

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar (UU RI No. 20 Th. 2008). Dalam sebuah kemitraan terjalin kerja sama antar pihak atau usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang optimal. Beberapa pakar mengatakan bahwa kemitraan merupakan suatu kerjasama formal antar individu, kelompok atau organisasi dalam mewujudkan tugas atau tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2009). Sedangkan menurut Ariadi & Abidin (2019), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip dasar saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dalam agribisnis, Kemitraan dapat diterapkan di seluruh lapisan sub-sistem, mulai dari sub-sistem satu hingga empat : 1. Sub sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi, 2. Sub Sistem Produksi Primer atau Usahatani (*on Farm*). 3. Sub Sistem Pengolahan / Agroindustri. (*of Farm*) 4. Sub Sistem Pemasaran, masing-masing sub sistem saling menguatkan untuk mencapai kebermanfaatan, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi kinerja. Petani, sebagai pelaku utama, sangat memerlukan sistem kemitraan yang terjalin dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Kemitraan tersebut dapat diterapkan di seluruh lapisan sub-sistem, mulai dari penyediaan *input* hingga pemasaran, yang saling menguatkan untuk mencapai kebermanfaatan, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi kinerja. Pola kemitraan, sebagai kerangka konseptual, menggambarkan hubungan antarpihak seperti inti (penyedia modal/teknologi), plasma (petani sebagai pelaku produksi), dan fasilitator, yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan pemberdayaan (Saragih, 1999). Sebaliknya, model kemitraan merupakan aplikasi praktis dari

pola tersebut, merinci mekanisme operasional seperti alur produksi, distribusi
keuntungan, dan

mitigasi risiko dalam rantai pasok (Rondhi *et al.*, 2019). Petani, sebagai pelaku utama, memerlukan kemitraan yang terjalin dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem agribisnis. Menurut Cao *et. al.* (2011), kemitraan ini terbentuk berdasarkan dinamika *supply and demand* dan harus berlandaskan asas, visi, dan misi bersama. Dengan demikian, petani dapat memperkuat lapisan kemitraan, termasuk organisasi dan usaha, untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan.

Kemitraan agribisnis kopi di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, melibatkan Perum Perhutani, petani kopi, LMDH Margomulyo, dan pengusaha kopi, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya dan pemasaran kopi. Namun, kemitraan ini rentan terhadap intervensi pihak ketiga yang dapat mengganggu kesepakatan bersama, menyebabkan ketidakstabilan kemitraan. LMDH Margomulyo berperan sebagai jembatan untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, tetapi fungsinya belum optimal, terutama dalam mengatasi paradoks kopi, yaitu kesenjangan harga antara petani dan konsumen (Aji, 2012).

Faktor internal dan eksternal melemahkan pemasaran kopi dalam kemitraan ini. Petani menghadapi harga gelondong basah yang rendah karena monopoli perantara, rendahnya daya tawar terhadap tengkulak, dan pengolahan kopi yang masih tradisional. Produk kopi utamanya untuk konsumsi lokal, dengan pasokan tambahan dari Kopi Rakyat saat permintaan meningkat, namun belum ada kebijakan pemerintah untuk standar harga kopi, memperburuk kesenjangan harga antara gelondong basah dan produk olahan. Kemitraan ini menghasilkan kopi Arabica dan Robusta dengan pengolahan dari gelondong basah hingga *green bean*, *roast bean*, dan bubuk kopi, tetapi tantangan seperti kurangnya koordinasi kelembagaan LMDH dan minimnya intervensi kebijakan menghambat potensi pasar yang luas, baik lokal maupun internasional. Penguatan peran LMDH, kebijakan harga yang jelas, dan modernisasi pengolahan diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan stabilitas kemitraan.

Kemitraan agribisnis kopi di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, yang melibatkan Perum Perhutani, petani kopi, LMDH

Margomulyo, dan pengusaha kopi, diidentifikasi sebagai pola kemitraan inti-plasma yang bertujuan mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pola ini, Perum Perhutani dan pengusaha kopi berperan sebagai inti, menyediakan lahan, modal, teknologi, dan akses pasar, sementara petani kopi sebagai plasma bertanggung jawab atas budidaya, dan LMDH Margomulyo berfungsi sebagai fasilitator komunikasi dan koordinasi. Evaluasi model ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga jual yang lebih adil, menjamin pasokan kopi berkualitas bagi pengusaha, serta memastikan pengelolaan lahan yang lestari oleh Perhutani. Peran LMDH sebagai fasilitator dapat diperkuat untuk mengatasi tantangan seperti intervensi pihak ketiga dan paradoks kopi (kesenjangan harga antara petani dan konsumen).

Perum Perhutani mengharapkan pengelolaan lahan hutan secara lestari untuk budidaya kopi tanpa merusak ekologi, sekaligus memperoleh bagi hasil, kepastian hukum penggunaan lahan, dan penguatan citra positif sebagai pendukung masyarakat lokal. Petani kopi menginginkan peningkatan pendapatan melalui harga jual yang lebih adil untuk mengatasi paradoks kopi, akses pasar yang lebih luas, pelatihan untuk meningkatkan kualitas produksi, serta kepastian akses lahan tanpa konflik. LMDH Margomulyo berharap dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif dalam menjembatani komunikasi antarpihak, mencegah intervensi pihak ketiga, memperkuat kapasitas organisasi, menyelesaikan konflik dengan transparansi, dan mengadvokasi kepentingan petani, terutama dalam negosiasi harga dan pasar. Sementara itu, pengusaha kopi menginginkan pasokan kopi berkualitas tinggi yang konsisten, keuntungan komersial melalui pengolahan dan pemasaran efisien, hubungan kemitraan jangka panjang yang stabil, serta pengembangan merek untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi lokal.

Industri kopi global menghadapi tantangan kompleks dalam menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Grabs & Ponte, (2019) mengidentifikasi adanya ketimpangan kekuasaan dalam rantai nilai kopi global, di mana petani kecil seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam distribusi manfaat. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Velten *et. al.* (2021) melalui meta-analisis 123 studi yang menunjukkan bahwa kemitraan dalam sektor kopi hanya

efektif ketika didukung oleh insentif ekonomi yang memadai dan kebijakan yang tepat. Sementara itu, studi Samper & Quiñones Ruiz (2017), menekankan pentingnya keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet* dalam kemitraan industri kopi global. Di Amerika Latin, khususnya Nikaragua, Bacon (2005) menemukan bahwa koperasi petani mampu mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan meningkatkan harga jual 20-30% lebih tinggi. Sedangkan di Kolombia, Dietz *et. al.* (2019) menunjukkan bahwa sertifikasi ganda masih memerlukan dukungan jejaring pembeli yang kuat untuk efektivitas maksimal. Penelitian Méndez *et. al.* (2010) di Amerika Tengah dan Meksiko mengkonfirmasi bahwa sertifikasi *Fair Trade* dan organik meningkatkan pendapatan petani, tetapi membutuhkan investasi awal yang tinggi.

Di Indonesia, sektor kopi menghadapi paradoks antara potensi yang besar dengan realitas kesejahteraan petani yang masih rendah. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia, namun sebagian besar petani kopi masih berada dalam kondisi marginal. Ibnu *et. al.* (2018) mengidentifikasi bahwa sertifikasi kopi di Indonesia hanya efektif ketika didukung oleh organisasi petani yang kuat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vicol *et. al.* (2018) yang menunjukkan bahwa intervensi rantai nilai komoditas kopi di Indonesia seringkali justru menguntungkan pihak yang lebih kuat seperti eksportir dan perusahaan besar. Nainggolan *et. al.* (2024) penelitian di Kabupaten Dairi menemukan bahwa kemitraan petani kopi baru berhasil ketika ada kepercayaan yang tinggi dan adaptasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, penelitian Zakki (2020) mengungkapkan bahwa transformasi budaya petani kopi Indonesia masih menghadapi hambatan dalam adopsi teknologi karena kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional.

Kawasan Trawas di Kabupaten Mojokerto memiliki keunikan tersendiri dalam lanskap kopi Indonesia. Terletak di lereng Gunung Penanggungan dengan ketinggian ideal untuk budidaya kopi, wilayah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan kopi berkelanjutan. Sedangkan realitas di lapangan menunjukkan bahwa petani kopi di Trawas menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan solusi inovatif. Keterlibatan multipihak dalam kawasan ini sangat

unik, dimana terdapat interaksi antara petani tradisional, pengusaha kopi modern, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo, dan Perhutani sebagai pengelola hutan negara. Konfigurasi aktor yang kompleks ini menciptakan dinamika kemitraan yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik, khususnya dalam konteks Indonesia.

Tinjauan literatur mengungkapkan beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian kemitraan kopi fokus pada hubungan bilateral antara petani dengan satu aktor tertentu (Bacon, 2005; Dietz *et al.*, 2019; Muradian & Pelupessy, 2005). Penelitian yang mengeksplorasi kemitraan multipartit dengan melibatkan lebih dari tiga aktor masih sangat terbatas, padahal realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas hubungan yang melibatkan berbagai pihak. Penelitian tentang peran Perhutani dalam kemitraan kopi masih sangat jarang ditemukan. Meskipun Wisadirana *et. al.* (2024) menyinggung kemitraan dengan Perhutani, fokusnya masih pada aspek produktivitas semata. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis peran Perhutani sebagai pengelola lahan hutan negara dalam model kemitraan kopi berkelanjutan. Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam kemitraan kopi hampir tidak ditemukan dalam literatur. Padahal LMDH memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat lokal dengan pengelola hutan negara. Keberadaan LMDH dalam kemitraan kopi dapat menjadi faktor kunci yang belum tereksplorasi. Sebagian besar penelitian kemitraan kopi di Indonesia dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah terkenal seperti Aceh, Jawa Barat, atau Sulawesi Selatan. Kawasan Trawas, Mojokerto, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi unik, belum mendapat perhatian akademik yang memadai.

Dari perspektif teoritis, penelitian-penelitian yang ada menunjukkan fragmentasi dalam pendekatan teoritis. Beberapa penelitian menggunakan *Resource Dependence Theory* (Bacon, 2005; Çeltekligil *et al.*, 2019), *Transaction Cost Economics* (Dietz *et al.*, 2019; Muradian & Pelupessy, 2005), atau *Social Capital Theory* (Nainggolan *et al.*, 2024; Rivera *et al.*, 2019) secara terpisah. Belum ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai teori ini dalam satu kerangka

analisis yang komprehensif. Selain itu, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan teori yang dikembangkan negara maju, sementara aplikasinya dalam penelitian ini adalah negara berkembang dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda masih perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini menciptakan gap antara teori dan praktik, khususnya Indonesia dengan keragaman budaya dan kelembagaan lokal yang kompleks. Teori kemitraan yang ada juga belum secara memadai mengakomodasi kompleksitas hubungan dalam ekosistem hutan. Kebanyakan teori kemitraan dalam agribisnis dikembangkan untuk konteks lahan pertanian konvensional, bukan untuk kawasan hutan dengan sistem pengelolaan yang melibatkan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian kemitraan kopi dengan fokus faktor ekonomi telah dilakukan secara ekstensif oleh berbagai peneliti. Bacon (2005) meneliti petani kecil Nikaragua dengan fokus pada faktor ekonomi berupa akses pasar internasional dan faktor sosial keanggotaan koperasi menggunakan pendekatan *Resource Dependence Theory* (RDT), menemukan bahwa koperasi mampu mengurangi ketergantungan pada tengkulak dengan peningkatan harga 20-30% lebih tinggi. Çeltekligil *et. al.* (2019) juga menggunakan RDT dalam mengkaji kemitraan petani-pemasok untuk akses sumber daya, membuktikan bahwa ketergantungan sumber daya eksternal dapat dikelola melalui kemitraan strategis. Dietz *et. al.* (2019) mengkaji petani Kolombia dengan faktor ekonomi sertifikasi ganda dan faktor sosial jejaring pembeli melalui *Transaction Cost Economics* (TCE), mengungkapkan bahwa sertifikasi dapat mengurangi biaya transaksi dalam negosiasi dan pemantauan kualitas. Muradian & Pelupessy (2005) juga menggunakan TCE dalam meneliti petani Uganda dengan fokus faktor ekonomi biaya transaksi dan faktor kelembagaan, berhasil membuktikan bahwa kemitraan petani-eksportir mampu menurunkan biaya transaksi hingga 45%. Hernandez-Aguilera *et. al.* (2018) menggunakan teori nilai rantai berkelanjutan dalam menganalisis faktor kualitas produk, ekonomi (harga premium), dan sosial (relasi langsung petani-pembeli), menemukan bahwa model *relationship coffee* dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan. Wisadirana *et. al.* (2024) meneliti petani Malang, Indonesia dengan faktor ekonomi (akses modal, lahan) dan

pengetahuan menggunakan teori produksi sosial, membuktikan bahwa kemitraan dengan Perhutani dapat meningkatkan produktivitas melalui akses lahan dan pelatihan.

Dimensi sosial dalam kemitraan kopi mendapat perhatian khusus dari beberapa peneliti dengan “pendekatan teori modal sosial dan *relational embeddedness*”. Nainggolan *et. al.* (2024) meneliti petani di Kabupaten Dairi, Indonesia dengan fokus faktor sosial berupa komunikasi dan kepercayaan serta faktor budaya nilai lokal menggunakan teori modal sosial, menemukan bahwa kemitraan hanya berhasil jika terdapat kepercayaan tinggi (*relational embeddedness*) dan adaptasi budaya yang baik. Rivera *et. al.* (2019) memperkuat temuan ini melalui studi kasus di 7 negara dengan fokus faktor modal sosial dan kelembagaan lokal menggunakan *Social Capital Theory*, mengonfirmasi bahwa jaringan yang kuat (*relational embeddedness*) dan kepemimpinan lokal (*institutional embeddedness*) menjadi kunci sukses kemitraan. Afandi *et. al.* (2022) menggunakan pendekatan partisipatif (Pretty, 1995) dalam mengkaji model kemitraan pasar-petani untuk kopi berkelanjutan dengan faktor sosial kepercayaan dan jaringan serta faktor ekonomi akses pasar, membuktikan bahwa kemitraan berbasis kepercayaan (*relational embeddedness*) dapat meningkatkan stabilitas harga dan adopsi praktik berkelanjutan.

Aspek kelembagaan dalam kemitraan kopi diteliti dengan menggunakan berbagai pendekatan teoritis, termasuk *institutional embeddedness*. Ibnu *et. al.* (2018) meneliti petani Indonesia dengan fokus faktor sosial berupa organisasi petani dan faktor ekonomi manfaat sertifikasi menggunakan teori kelembagaan, menemukan bahwa sertifikasi hanya efektif jika didukung oleh organisasi petani yang kuat dan terintegrasi dalam sistem kelembagaan lokal (*institutional embeddedness*). Méndez *et. al.* (2010) menggunakan teori ekonomi kelembagaan dalam mengkaji petani kopi di Amerika Tengah dan Meksiko dengan faktor sertifikasi *Fair Trade*, organik dan pendapatan, mengungkapkan bahwa sertifikasi dapat meningkatkan pendapatan namun membutuhkan dukungan kelembagaan (*institutional embeddedness*) untuk mengurangi biaya awal yang tinggi. Opolot *et. al.* (2018) meneliti petani Uganda dengan faktor pelatihan kewirausahaan dan

akses pasar menggunakan teori kapabilitas petani (*Farmer Capability Approach*), membuktikan bahwa pelatihan universitas dapat meningkatkan kompetensi pemasaran petani ketika didukung oleh kelembagaan pendidikan yang mapan (*institutional embeddedness*).

Beberapa penelitian menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan *multiple* faktor secara komprehensif, termasuk analisis *institutional* dan *relational embeddedness*. Velten *et. al.* (2021) melakukan meta-analisis terhadap 123 studi dengan fokus faktor ekonomi, ekologis, dan sosial (daya tawar, investasi bersama) menggunakan teori kolaborasi multi-*stakeholder*, menemukan bahwa kemitraan hanya efektif jika mencakup insentif ekonomi dan dukungan kebijakan (*institutional embeddedness*) serta hubungan yang kuat antar aktor (*relational embeddedness*). Bager & Lambin (2020) meneliti perusahaan kopi global dengan faktor ekonomi sertifikasi dan faktor lingkungan praktik berkelanjutan menggunakan teori keberlanjutan korporat, mengungkapkan bahwa sertifikasi *Fair Trade* dan organik dapat meningkatkan nilai tambah tetapi membutuhkan kolaborasi multi-pihak yang didukung oleh kelembagaan yang kuat (*institutional embeddedness*). Grabs & Ponte (2019) mengkaji dinamika kekuasaan dalam rantai nilai kopi global dengan faktor kekuatan pasar, sertifikasi, dan ketimpangan relasi menggunakan teori ekonomi politik global, membuktikan bahwa kemitraan yang adil memerlukan redistribusi kekuasaan dan insentif ekonomi yang didukung oleh struktur kelembagaan yang inklusif (*institutional embeddedness*).

Beberapa peneliti fokus pada aspek teknologi dan pengetahuan dalam kemitraan kopi dengan menyoroti *institutional* dan *relational embeddedness*. Contreras-Medina *et. al.* (2024) meneliti petani kopi di Guerrero, Meksiko dengan faktor pengetahuan tradisional, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi lokal menggunakan teori pengelolaan pengetahuan lokal (*Traditional Knowledge Management*), menemukan bahwa integrasi pengetahuan tradisional dengan praktik modern dapat meningkatkan keberlanjutan ketika didukung oleh kelembagaan lokal (*institutional embeddedness*) dan hubungan yang erat antara peneliti dan petani (*relational embeddedness*). Devaux *et. al.* (2018) mengkaji inovasi pertanian di negara berkembang dengan faktor inovasi teknologi, akses

pasar, dan kebijakan pemerintah menggunakan teori pembangunan rantai nilai inklusif (*Inclusive Value Chain Development*), membuktikan bahwa kemitraan dengan pelaku riset dan swasta dapat mempercepat adopsi teknologi jika terdapat kepercayaan (*relational embeddedness*) dan dukungan kebijakan (*institutional embeddedness*).

Penelitian yang mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kemitraan kopi menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Fischer *et. al.* (2019) menggunakan teori pembelajaran sosial dalam meneliti lahan kopi di Kolombia dengan faktor ekologis konservasi biodiversitas dan faktor sosial kolaborasi lintas sektor, membuktikan bahwa kemitraan petani LSM berhasil mengintegrasikan produksi kopi dengan konservasi. Jezeer *et. al.* (2018) menerapkan teori pertanian berkelanjutan dalam mengkaji petani kopi skala kecil di Peru dengan faktor agroekologi (naungan, input organik) dan faktor ekonomi biaya produksi, menemukan bahwa sistem kopi berbasis naungan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Leventon *et. al.* (2017) menggunakan teori tata kelola kolaboratif dalam meneliti lanskap pertanian di Meksiko dengan faktor ekologis konektivitas habitat dan faktor sosial koordinasi multi-petani, membuktikan bahwa kemitraan lintas lahan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Long & Khan (2025) menggunakan teori pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam meneliti petani kopi di Yunnan, China dengan faktor perilaku produksi hijau dan SDGs, mengkonfirmasi bahwa adopsi praktik ramah lingkungan sangat tergantung pada insentif ekonomi dan dukungan kebijakan.

Urgensi penelitian ini didorong oleh beberapa faktor strategis. Pertama, meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri kopi menuntut adanya model kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Lalu, kebijakan pemerintah Indonesia tentang perhutanan sosial memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan negara. Penelitian ini dapat memberikan

masukannya penting tentang bagaimana kemitraan kopi dapat menjadi instrumen efektif dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial.

Penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas hubungan multipihak yang mencerminkan realitas di lapangan dengan mengintegrasikan aspek produksi, pemasaran, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka kemitraan yang holistik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya fokus pada kemitraan bilateral (Bacon, 2005; Dietz *et al.*, 2019; Muradian & Pelupessy, 2005), penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama "*Resource Dependence Theory (RDT)*, *Social Capital Theory*, dan *Institutional Theory*" dalam satu kerangka analisis komprehensif yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Hasil integrasi ini melahirkan pendekatan "*Embedded Partnership Model*" yang menggabungkan aspek *relational embeddedness* dan *institutional embeddedness*. Pendekatan ini merupakan inovasi yang belum pernah diterapkan dalam model kemitraan kopi di kawasan hutan negara, khususnya dengan melibatkan lembaga pengelola hutan (Perhutani) dan organisasi masyarakat hutan (LMDH).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan teknik analisis risiko terintegrasi yang mencakup identifikasi model kemitraan, analisis variabel dominan, penilaian risiko, dan formulasi strategi pengelolaan risiko dalam satu desain penelitian kohesif. Kompleksitas permasalahan ini semakin terlihat dengan kehadiran berbagai entitas kelembagaan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan strategis sebagai pemoderasi hubungan antara petani dan pelaku usaha lainnya. Keberadaan BUMDes memberikan dimensi baru dalam dinamika kemitraan, berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator dalam mengoptimalkan nilai tambah produk kopi di tingkat desa. Dengan mempertahankan struktur inti-plasma sambil mengintegrasikan elemen pemberdayaan desa melalui BUMDes, sejalan dengan teori *local economic development* (Tambunan, 2005) dan *value chain development* (Kaplinsky & Morris, 2001). Peran BUMDes sebagai katalisator inovasi mendukung peningkatan nilai tambah, sementara fungsi mediasi memperkuat *governance* kemitraan.

Momentum kebijakan terbaru pemerintahan 2025 dengan pembentukan Koperasi Merah Putih menandai paradigma baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan, yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi petani dan UMKM melalui platform koperasi terintegrasi secara nasional dan berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai global, serta mengintegrasikan produksi kopi lokal dengan pasar domestik dan internasional.

Selanjutnya, tren konsumen global yang semakin peduli terhadap asal-usul produk dan praktik berkelanjutan menciptakan peluang pasar yang besar bagi kopi yang diproduksi melalui kemitraan berkelanjutan. Pola kemitraan inti plasma yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kopi berkelanjutan di kawasan hutan lainnya di Indonesia. Kompleksitas tantangan yang dihadapi petani kopi di Indonesia memerlukan solusi inovatif yang melibatkan berbagai pihak. Model kemitraan agribisnis kopi berbasis pemberdayaan desa di Desa Ketapanrame mengaplikasikan pola inti-plasma plus dengan mengintegrasikan BUMDes sebagai fasilitator, mediator, dan katalisator. Berbeda dari pola inti-plasma tradisional, model ini menambahkan dimensi pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengolahan produk, agrowisata, dan reinvestasi keuntungan untuk desa. Dengan mekanisme operasional yang terstruktur, strategi penguatan kapasitas, dan mitigasi risiko, model ini mampu mengoptimalkan kesejahteraan petani, keberlanjutan lahan, pasokan kopi berkualitas, dan stabilitas kemitraan, sekaligus mengatasi tantangan seperti paradoks kopi dan intervensi pihak ketiga.

Dengan demikian, penelitian tentang "Model Kemitraan Antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Margomulyo dan Perhutani Trawas, Kabupaten Mojokerto" menjadi sangat relevan dan *urgent* untuk dilakukan guna mengisi gap penelitian dan teoritis yang ada, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kopi berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menghadirkan kebaruan yang signifikan dalam pengembangan kerangka kemitraan, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi petani dan pengusaha kopi. Kebaruan tersebut mencakup aspek praktis dan teoritis yang memperkaya wacana serta praktik kemitraan tripartit. Adapun poin-poin kebaruan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Optimalisasi Peran BUMDes sebagai Lembaga Intermediasi Strategis dalam Model Kemitraan Agribisnis Desa**

Dalam dinamika pembangunan agribisnis berbasis komunitas, model kemitraan antara petani dan pelaku usaha pada awalnya lebih banyak bertumpu pada hubungan informal yang dibangun atas dasar kepercayaan dan keuntungan timbal balik. Hubungan ini umumnya bersifat pragmatis, jangka pendek, serta belum mampu menjawab kompleksitas tantangan struktural yang dihadapi oleh para petani, terutama dalam hal akses pasar, pembiayaan, dan keberlanjutan produksi. Di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, kemitraan yang terjalin antara petani, pengusaha kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Margomulyo, dan Perhutani menunjukkan gejala serupa: hubungan antar pihak berlangsung secara fungsional, namun belum sepenuhnya terkoordinasi secara strategis dalam kerangka kelembagaan yang terintegrasi.

Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan *multistakeholder* dalam sektor agribisnis, terutama yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, muncul kebutuhan mendesak akan model kemitraan yang tidak hanya adaptif tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran lembaga lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat relevan sebagai simpul kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Namun, dalam praktiknya, peran BUMDes masih belum teroptimalisasi secara strategis dalam struktur kemitraan agribisnis yang ada.

Penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan menawarkan kebaruan berupa optimalisasi peran BUMDes sebagai lembaga intermediasi strategis dalam model kemitraan agribisnis desa. BUMDes tidak lagi hanya berfungsi sebagai aspek ekonomi desa semata, tetapi juga mengintegrasikan aspek psikologis berupa motivasi dan pembinaan, serta sebagai katalisator yang mengintegrasikan fungsi koordinasi, fasilitasi pasar, serta pengelolaan risiko dalam hubungan kemitraan inti-plasma yang melibatkan petani, pengusaha kopi, LMDH, dan Perhutani. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif, BUMDes menjadi aktor kunci dalam memperkuat daya tawar petani, meningkatkan efisiensi rantai nilai, serta memastikan keberlanjutan ekosistem agribisnis desa. Kebaruan ini nantinya mampu meningkatkan produktivitas petani serta memperluas akses pasar secara berkelanjutan. Lebih jauh, model ini bersifat fleksibel, inklusif, dan dapat direplikasi pada berbagai komoditas dan wilayah geografis di Indonesia. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal di Trawas, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual dan praktis bagi pengembangan agribisnis berbasis komunitas dalam kerangka pembangunan dari bawah (*bottom-up development*) di tingkat nasional.

2) Peran Kepercayaan dan Institusi Lokal dalam Pola Kemitraan Agribisnis Desa

Model kemitraan agribisnis, terutama dalam komoditas kopi rakyat di kawasan hutan, pada umumnya berkembang dari hubungan informal yang dilandasi oleh kepercayaan personal dan orientasi pada keuntungan jangka pendek. Hubungan semacam ini cenderung bersifat individual, tidak diatur secara formal, serta belum mampu mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi petani, seperti keberlanjutan produksi, keterbatasan akses pasar, dan pengelolaan risiko. Pola kemitraan tersebut lazim ditemukan dalam relasi antara petani, pengusaha lokal, dan lembaga pengelola lahan seperti Perhutani, di mana keberlanjutan relasi sangat bergantung pada stabilitas relasi interpersonal dan keterbatasan ruang negosiasi institusional. Namun,

dinamika sosial ekonomi masyarakat desa menunjukkan bahwa fondasi kepercayaan saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas kemitraan yang bersifat *multistakeholder* dan berorientasi jangka panjang. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan, menyelaraskan perbedaan posisi tawar, serta mengelola potensi konflik dan risiko yang muncul. Dalam konteks inilah institusi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memainkan peran strategis, bukan hanya sebagai fasilitator ekonomi, tetapi sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi kultural dan otoritas lokal untuk membangun tata kelola kolaboratif yang inklusif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa integrasi dua dimensi kunci dalam keberhasilan kemitraan agribisnis desa, yaitu *relational embeddedness* (kepercayaan dan interaksi sosial) dan *institutional embeddedness* (struktur dan norma kelembagaan lokal). Keunikan pendekatan ini terletak pada pengakuan terhadap pentingnya elemen sosial seperti legitimasi kepala desa, kepercayaan kepada BUMDes, dan pengaruh budaya lokal dalam menentukan pola interaksi, pengambilan keputusan, serta distribusi hasil dalam kemitraan. Penelitian ini juga mengaitkan faktor lingkungan fisik seperti iklim dan topografi dengan strategi adaptasi agroklimat yang disepakati secara kolektif dalam kemitraan tripartit antara petani kopi, pengusaha, LMDH, dan Perhutani.

Dengan pendekatan tersebut, kemitraan yang semula bersifat fungsional dan informal berkembang menjadi model kolaboratif yang stabil, produktif, dan adil. Peran institusi lokal tidak hanya mengisi kekosongan koordinasi formal, tetapi juga memperkuat sistem kepercayaan yang bersifat lintas individu dan melembaga. Hasil analisis empiris membuktikan bahwa model ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih proporsional. Kebaruan inilah yang menjadikan penelitian ini relevan secara konseptual dan aplikatif, serta dapat direplikasi secara nasional dalam kerangka pemberdayaan masyarakat agraris berbasis modal sosial dan kelembagaan lokal yang adaptif.

3) **Kontribusi Pengembangan Model Kemitraan Agribisnis Desa terhadap pengembangan Teori**

Petani, pengusaha kopi lokal, dan Perhutani selama ini membentuk pola hubungan yang bersifat pragmatis, namun belum berada dalam kerangka kemitraan yang terstruktur dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Hubungan tersebut berkembang dari praktik informal yang dibangun atas dasar kepercayaan antar pelaku dan dorongan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Tanpa dukungan institusi yang kuat, pola kemitraan ini cenderung transaksional, berfokus pada efisiensi jangka pendek, dan rentan terhadap ketidakstabilan pasar, perubahan harga, serta keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Hal ini terutama terlihat dalam konteks agribisnis desa, khususnya pada komoditas kopi rakyat yang dikelola di kawasan hutan.

Seiring meningkatnya kompleksitas interaksi dalam sistem agribisnis, muncul kebutuhan untuk membangun model kemitraan yang tidak hanya berbasis pada kepercayaan interpersonal dan kalkulasi keuntungan, tetapi juga terstruktur secara kelembagaan dan responsif terhadap faktor sosial, ekonomi, dan ekologis. Penelitian ini merespon kebutuhan tersebut dengan memposisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mediator strategis yang menjembatani kepentingan antara petani, pengusaha kopi, LMDH, dan Perhutani dalam kemitraan tripartit. BUMDes di sini tidak sekadar berfungsi sebagai entitas ekonomi desa, melainkan sebagai simpul kelembagaan yang menyatukan logika pasar dengan norma lokal, serta membangun koordinasi formal yang sebelumnya tidak terstruktur.

Kebaruan teoritis dari penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *embeddedness* dalam kemitraan agribisnis desa, melalui integrasi dua dimensi utama: *relational embeddedness* dan *institutional embeddedness*. Pendekatan ini memperluas fondasi teori awal yang berpijak pada *Resource Dependence Theory* (RDT) dan *Transaction Cost Economics* (TCE) yang menekankan pada efisiensi hubungan antar organisasi dan pengurangan biaya

transaksi dengan memasukkan pengaruh konteks sosial dan kelembagaan lokal secara lebih holistik. Teori Kontrol Eksternal Dasar, Teori Ketergantungan, serta Teori Kontingensi juga menjadi pijakan dalam menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan eksternal mendorong kebutuhan adaptasi kelembagaan dalam kemitraan agribisnis.

Relational embeddedness tercermin dalam aspek kompetensi mitra, perencanaan produksi berbasis permintaan, optimalisasi pendapatan petani, serta peningkatan produktivitas pengolahan melalui inovasi pascapanen. Sementara itu, *institutional embeddedness* meliputi mekanisme pengelolaan risiko modal, penetapan harga strategis, bentuk perjanjian kemitraan yang fleksibel, serta upaya pelestarian budaya lokal dalam proses produksi dan distribusi. Integrasi kedua dimensi ini terbukti secara empiris mampu mengurangi risiko ketidakpastian pasar, menurunkan biaya transaksi, serta memperkuat stabilitas kemitraan dalam jangka panjang.

Dengan memadukan pendekatan dari ilmu sosiologi, ekonomi, dan teori organisasi, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah teoritis tentang kemitraan agribisnis, tetapi juga menawarkan model yang relevan secara praktis dan dapat direplikasi secara nasional. Pendekatan multidimensi *embeddedness* ini menjawab kebutuhan kemitraan yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual terhadap realitas lokal Indonesia, serta memberikan kontribusi teoritis signifikan dalam pengembangan kerangka kolaborasi *multistakeholder* di sektor agribisnis desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas beberapa rumusan masalah yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana identifikasi dan mengevaluasi model kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

- 2) Bagaimana variabel-variabel yang dominan mempengaruhi model kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
- 3) Bagaimana analisis risiko yang sedang dihadapi dalam kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
- 4) Bagaimana strategi yang dapat dirumuskan dalam mengelola risiko pada kemitraan yang terjalin antara Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi Model Kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo Desa Ketapanrame dengan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
- 2) Menganalisis variabel-variabel yang berperan dalam Model Kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- 3) Untuk mengidentifikasi risiko yang dominan yang mengintervensi kemitraan antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto
- 4) Merumuskan strategi dalam mengelola risiko serta mengembangkan model kemitraan yang terjalin antara Petani, Pengusaha Kopi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Margomulyo dan Perhutani Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang komprehensif bagi berbagai pihak dan bidang keilmuan:

- 1) Manfaat Akademis:

- a. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini memperkaya literatur kemitraan agribisnis dengan mengembangkan "*Embedded Partnership Model*" yang mengintegrasikan *Resource Dependence Theory*, *Social Capital Theory*, dan *Institutional Theory* dalam konteks kemitraan multipihak. Model teoritis ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian kemitraan di sektor pertanian lainnya, khususnya yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Pengembangan Metodologi: Pendekatan *mixed-method* dengan analisis *embeddedness* yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diadopsi untuk penelitian kemitraan serupa di sektor agribisnis. Teknik analisis risiko terintegrasi yang digunakan juga dapat menjadi referensi metodologis untuk penelitian manajemen risiko dalam kemitraan multipihak.
- c. Referensi Ilmiah: Hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kemitraan dalam konteks perhutanan sosial, agribisnis berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan empiris dari kawasan Trawas dapat menjadi *baseline* data untuk penelitian komparatif di kawasan lainnya.

2) Manfaat Praktis:

- a. Bagi Petani Kopi: Penelitian ini memberikan panduan praktis tentang cara membangun dan memelihara kemitraan yang menguntungkan dengan berbagai pihak. Model kemitraan yang dihasilkan dapat membantu petani meningkatkan posisi tawar, akses pasar, dan pendapatan melalui kolaborasi yang efektif. Strategi pengelolaan risiko yang dirumuskan dapat membantu petani mengantisipasi dan mengelola berbagai tantangan dalam kemitraan.
- b. Bagi Pengusaha Kopi: Hasil penelitian memberikan *blueprint* untuk membangun kemitraan berkelanjutan dengan petani yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan. Model ini dapat membantu pengusaha mengembangkan *supply chain* yang lebih stabil dan berkelanjutan.

- c. Bagi LMDH dan Masyarakat Lokal: Penelitian ini memberikan panduan tentang cara mengoptimalkan peran LMDH sebagai fasilitator kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Model yang dikembangkan dapat membantu LMDH meningkatkan kapasitas organisasi dan memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya hutan secara partisipatif.
- d. Bagi Perhutani: Hasil penelitian memberikan masukan strategis tentang cara mengintegrasikan program perhutanan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan kopi berkelanjutan. Model ini dapat menjadi *pilot project* untuk replikasi di kawasan hutan negara lainnya.
- e. Bagi BumDes : Penelitian ini memberikan masukan terhadap peran BumDes dalam kemitraan agribisnis desa sebagai : fasilitator, mediator, dan pendukung pemberdayaan masyarakat. BUMDes menjadi penghubung antar pihak, menyelesaikan konflik, serta menjaga kesepakatan kemitraan, guna menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kelembagaan.

3) Manfaat Kebijakan:

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan kemitraan agribisnis berkelanjutan di tingkat lokal. Model kemitraan dapat menjadi referensi untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam.
- b. Bagi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan perhutanan sosial, khususnya dalam mengintegrasikan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan konservasi hutan. Model kemitraan multipihak dapat diadopsi sebagai *best practice* untuk implementasi perhutanan sosial.
- c. Bagi Kementerian Pertanian: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan kopi nasional, khususnya dalam mendorong kemitraan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing kopi Indonesia di pasar global.

4) Manfaat Sosial-Ekonomi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat: Model kemitraan yang dihasilkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif, meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat lokal melalui kolaborasi yang inklusif dan berkeadilan.
- b. Pengentasan Kemiskinan: Kemitraan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan petani kopi dan masyarakat sekitar hutan, berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan.
- c. Konservasi Lingkungan: Model kemitraan yang mengintegrasikan aspek konservasi dapat mendorong praktik budidaya kopi yang ramah lingkungan dan mendukung upaya pelestarian hutan.

5) Manfaat Jangka Panjang:

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya *Goal 1 (No Poverty)*, *Goal 8 (Decent Work and Economic Growth)*, *Goal 15 (Life on Land)*, dan *Goal 17 (Partnerships for the Goals)*. Model kemitraan yang dikembangkan dapat menjadi *prototype* untuk pengembangan agribisnis berkelanjutan di Indonesia dan negara berkembang lainnya dengan karakteristik serupa.